

BAB V

KESIMPULAN, PEMBAHASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis tentang "Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Kenaikan Kelas di atas, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas

Pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang digunakan pada ketiga sekolah yang menjadi obyek penelitian tampak seperti pada tabel di bawah ini.

TABEL XII

Pola Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Kenaikan kelas
di SMA, "X", "Y", dan "Z"

| Nama Sekolah | Kebijaksanaan | Pelaksanaan |
|--------------|----------------|----------------|
| SMA "X" | Ketat | Ketat |
| SMA "Y" | Agak longgar | Agak longgar |
| SMA "Z" | Sangat Longgar | Sangat Longgar |

Kebijaksanaan kenaikan kelas berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi pegangan dalam kenaikan kelas, ketentuan ini terutama menyangkut dasar-dasar pertimbangan serta penentuan kenaikan. Pelaksanaan kenaikan kelas berkenaan dengan prosedur yang ditempuh dalam proses penilaian hasil belajar siswa.

SMA "X" menggunakan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat. Dalam kebijaksanaan kenaikan kelas SMA ini berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan kenaikan kelas seperti yang tercantum dalam kurikulum, yaitu: 1) dasar pertimbangan hanya berkenaan dengan segi-segi akademis, 2) perbaikan nilai hanya pada tes subsumatif dan hanya diberikan pada siswa yang punya alasan kuat. Pelaksanaan kenaikan kelas sesuai dengan ketentuan, tanpa memberi kesempatan kepada guru dan wali kelas untuk mengadakan perbaikan nilai.

SMA "Y" menggunakan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang agak longgar, dalam arti selain mempertimbangkan segi akademis juga segi-segi non akademis, yaitu latar belakang sosial ekonomi, kesehatan, usaha belajar, aktivitas dalam organisasi dan perilaku siswa sehari-hari. Kebijakan tersebut diklasifikasikan sebagai agak longgar karena yang diperhatikan segi-segi non akademisnya hanya

siswa yang kekurangannya kecil (terpaut satu atau dua butir angka). Pelaksanaan kenaikan kelas juga diklasifikasikan sebagai agak longgar sebab walaupun perbaikan nilai hanya diberikan pada siswa-siswa yang terpaut kekurangan sedikit nilai tetapi bisa diadakan selain setelah tes sub sumatif juga setelah tes sumatif.

SMA "Z" menggunakan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang sangat longgar. Kebijaksanaan yang sangat longgar disimpulkan dari kenyataan bahwa selain segi akademis dan non akademis yang menjadi dasar pertimbangan kenaikan kelas, penilaian terhadap segi non akademis ini diberikan pada semua siswa tanpa batas (pada siswa yang terlemah sekalipun berlaku). Pelaksanaan kenaikan kelasnya juga longgar sebab kesempatan perbaikan nilai dapat dilakukan hampir pada setiap kesempatan, sehingga semua siswa dapat naik kelas.

Rumus yang digunakan untuk penentuan kenaikan kelas pada ketiga sekolah tersebut sama, yaitu rata-rata nilai sub sumatif dikali dua ditambah rata-rata nilai kokurikuler ditambah nilai sumatif dikali dua kemudian jumlah dari semuanya dibagi lima, tetapi nilai-nilai yang dimasukkan pada rumus tersebut diperoleh dari segi yang dinilai dan prosedur penilaian yang berbeda.

2. Konsistensi antara Kebijakanaksanaan dan Pelaksanaan

Dari ketiga sekolah yang menjadi objek penelitian tampaknya ada konsistensi antara kebijakanaksanaan kenaikan kelas yang ditempuh dengan pelaksanaannya. Sekolah yang melakukan kebijakanaksanaan kenaikan kelas ketat diikuti dengan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat, begitupun yang melakukan kebijakanaksanaan kenaikan kelas sangat longgar dalam pelaksanaan kenaikan kelas pun dilaksanakan sangat longgar.

3. Hubungan antara pola kebijakanaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas dengan kondisi sekolah

Terdapat hubungan antara pola kebijakanaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas dengan kondisi sekolah.

SMA "X" memiliki kondisi sekolah yang baik, sebagai sekolah yang telah berdiri lama memiliki reputasi yang baik sebagai sekolah favorit, terletak di daerah elit dan strategis, memiliki fasilitas belajar yang cukup, kemampuan dan pengalaman guru-gurunya baik, kemampuan siswa baik secara intelektual maupun ekonomis juga baik, mutu lulusannya juga dinilai baik. Kondisi yang baik ini melatarbelakangi digunakannya pola kebijakanaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat. Persentase ketidaknaikan yang kecil (sekitar 1%), karena memang mutu sekolahnya (hasil belajar siswanya) baik.

SMA "Y" kondisi sekolahnya cukup baik, kampus yang luas, fasilitas belajar yang relatif lengkap, guru-guru berpengalaman, walaupun bukan sekolah favorit tetapi cukup diminati oleh golongan masyarakat tertentu, kemampuan intelektual siswa sedang, kemampuan ekonomi sebagian besar juga sedang, disiplin sekolah cukup ketat, mutu lulusannya (hasil belajar siswa) cukup. Kondisi sekolah seperti di atas melatarbelakangi penggunaan pola kebijaksanaan dan pelaksanaan yang agak longgar. Meskipun demikian persentase ketidaknaikan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya relatif besar (tahun 1990/1991 sekitar 10%).

SMA "Z" kondisi sekolahnya termasuk kategori kurang baik. Status sekolah adalah swasta yang telah diakui, sekolah berlangsung sore hari, fasilitas belajar siswa kurang, sebagian besar guru adalah honorer berasal dari SMA Negeri, sebagian besar cukup berpengalaman, kemampuan intelektual dan ekonomi siswa umumnya termasuk kurang. Kondisi sekolah seperti di atas melatarbelakangi digunakannya pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang sangat longgar. Meskipun mutu sekolah (hasil belajar siswa) termasuk kurang, dengan digunakannya pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang longgar siswa yang tidak naik relatif sangat kecil (tahun 1990/1991 kurang dari 1%).

B. Pembahasan

Dari apa yang telah diuraikan dalam deskripsi, interpretasi dan kesimpulan nampak ada beberapa pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas. Ketiga sekolah yang diteliti memperlihatkan pola tersendiri, yaitu pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat, agak longgar dan sangat longgar.

Pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat (dilaksanakan secara obyektif dan sesuai dengan ketentuan kurikulum), digunakan di SMA "X". Meskipun demikian persentase yang tidak naik kelas di sekolah tersebut sangat kecil. Hal itu terjadi karena berbagai faktor. Faktor pertama, berkenaan dengan kondisi sekolah. Secara fisik kelengkapan fasilitas belajar SMA "X" agak kurang bila dibandingkan dengan SMA "Y", kampusnya lebih sempit, rasio ruang kelas dibandingkan dengan jumlah kelas (siswa) lebih kecil, waktu sekolah kurang menguntungkan karena sebagian pagi dan sebagian lagi siang hari, jumlah laboratorium juga lebih sedikit, unsur-unsur lainnya relatif sama. Kiranya unsur nama baik (reputasi) sekolah sehingga menjadi sekolah favorit, besar sekali pengaruhnya terhadap rasa tanggung jawab dan motivasi, baik kepala sekolah, guru-guru maupun staf sekolah yang lain untuk mempertahankan kalau mungkin meningkatkan mutu sekolah. Kepala sekolah dan

guru-guru yang ditempatkan di sekolah ini, merupakan orang-orang "pilihan", dalam arti mereka mempunyai kemampuan lebih. Perpaduan antara rasa tanggung jawab, dan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah dengan kemampuan lebih yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru-guru, kiranya menjadi salah satu faktor penting bagi tingginya mutu sekolah (dalam hal ini mutu hasil belajar siswa). Faktor kedua, adalah kemampuan akademis siswa dan kemampuan ekonomi orang tua siswa. Para siswa yang masuk/diterima di sekolah ini adalah mereka yang memiliki kemampuan akademis (dinyatakan dalam NEM) yang tinggi (rata-rata 8 ke atas). Umumnya mereka juga berasal dari keluarga yang kondisi ekonominya cukup baik. Kondisi ekonomi yang cukup baik juga melatarbelakangi aspirasi lanjutan studi mereka. Umumnya para siswa yang belajar di SMA "X" ingin dan merencanakan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi serta Jurusan yang menjadi pilihan mereka adalah yang punya nama, seperti ITB, IPB, UI, UGM, Unpad, Unpar, Trisakti dll. Sebagaian besar dari lulusan sekolah ini memang berhasil memasuki Perguruan Tinggi dan Jurusan yang mereka inginkan. Hal itu dimungkinkan, bukan saja karena kemampuan akademis mereka baik, fasilitas belajar yang mencukupi, tetapi karena umumnya mereka juga belajar dengan sungguh-sungguh. Motivasi dan usaha belajarnya cukup tinggi.

Apabila dirangkumkan, faktor-faktor yang mendukung

dilaksanakannya ketentuan dan prosedur pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat (obyektif dan sesuai ketentuan) adalah karena kondisi peserta didik dan pendidik. Baik pada peserta didik maupun pendidik faktor pendukung tersebut berkenaan dengan aspek kemampuan, motivasi dan usaha serta fasilitas belajar. Kekurangan fasilitas belajar di sekolah masih bisa diatasi apabila orang tua bisa menyediakannya di rumah.

Pola kenaikan kelas yang agak longgar dan sangat longgar (adanya penyesuaian dari ketentuan dalam kurikulum), dilaksanakan di SMA "Y" dan "Z". Pada kedua sekolah tersebut ketentuan atau dasar pertimbangan utamanya adalah ketentuan akademis (nilai tes subsumstif, sumatif dan kehadiran), tetapi di samping itu ada beberapa ketentuan lain yang bukan ketentuan akademis (ketentuan dalam kurikulum) dijadikan dasar pertimbangan, yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas dalam organisasi siswa, kesehatan, usaha belajar dan kondisi ekonomi orang tua. Selain adanya penambahan segi yang dipertimbangkan dalam kenaikan kelas pada kedua sekolah tersebut ada penurunan kriteria kehadiran, di SMA "X" 90%, sedang di SMA "Y" dan "Z" hanya 85% dan 80%. Penyesuaian bukan hanya pada segi yang dipertimbangkan tetapi juga dalam pelaksanaan penilaian. Kalau pada SMA "X" tidak ada tes perbaikan, maka pada SMA "Y" dan "Z" perbaikan dapat dilakukan setelah setiap tes subsumatif, pada SMA "Z" boleh mengadakan perbaikan setelah tes sumatif. Pada SMA "Y"

perbaikan dan penilaian segi-segi non akademis hanya dilakukan terhadap para siswa yang terpaut nilai kurang sedikit (rata-rata nilai 5), tetapi di SMA "Z" perbaikan dan penilaian segi-segi non akademis ini tanpa batas. Dengan demikian akibatnya berbeda. Di SMA "Y" meskipun ada kelonggaran tetapi masih terbatas, hanya yang kekurangannya sedikit, oleh karena itu persentase siswa yang tidak naik masih relatif cukup besar (10%). Di SMA "Z" tingkat kelonggarannya lebih besar, seolah-olah tanpa batas, sehingga praktis semua siswa naik kelas.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang longgar pada kedua SMA yang diteliti, berkaitan erat dengan mutu sekolah terutama mutu hasil belajar siswa. Mutu sekolah atau lebih khusus mutu hasil belajar siswa dilatarbelakangi oleh komponen-komponen penunjang yang sama dengan di SMA yang bermutu baik, tetapi dalam kondisi yang berbeda.

Walaupun mungkin tidak secara mencolok, kemampuan guru-guru di SMA "Y" berada di bawah SMA "X", dan SMA "Z" di bawah SMA "Y". Menurut pendapat peneliti, walaupun unsur kemampuan juga berpengaruh, tetapi yang lebih besar pengaruhnya pada faktor guru adalah tanggung jawab (idealisme) dan motivasi bekerja (mengajar). Menurut pengamatan penulis, guru-guru yang bekerja pada kedua sekolah tersebut lebih besar didorong oleh motif mencari nafkah. Faktor lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap mutu hasil belajar adalah

kemampuan, motivasi dan usaha belajar siswa. Kemampuan akademis para siswa SMA "Y" rata-rata jauh di bawah SMA "X" (NEM masuk rata-rata 5,5 - 6), sedang SMA "Z" di bawahnya lagi. Kondisi ekonomi orang tua di SMA "Y" rata-rata menengah ke atas, sedang di SMA "Z" sebagian besar kurang. Kemampuan akademis dan kondisi ekonomi orang tua mempengaruhi aspirasi lanjutan studi. Para siswa yang kemampuan akademisnya cukup dan kondisi ekonominya cukup atau baik, berkeinginan melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi, umumnya Perguruan Tinggi swasta yang baik, tetapi siswa-siswa yang kemampuan akademisnya kurang dan juga kondisi ekonominya kurang atau cukup sebagian tidak ingin melanjutkan studi tetapi sebagian lainnya walaupun ingin melanjutkan studi tetapi keinginan itu tidak kuat. Keinginan dan aspirasi untuk melanjutkan studi berpengaruh besar terhadap tumbuhnya motivasi belajar dan usaha belajar. Para siswa yang keinginan dan aspirasi lanjutan studinya goyah atau tidak memiliki keinginan atau aspirasi melanjutkan studi, maka motivasi dan usaha belajarnya juga rendah. Rendahnya kemampuan, motivasi dan usaha belajar siswa, melatarbelakangi mutu hasil belajar mereka. Mutu hasil belajar ini akan dipengaruhi pula oleh kemampuan, motivasi dan cara kerja para pendidiknya.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas berhubungan erat dengan kemampuan sekolah meningkatkan dan mempertahankan mutu sekolah, khususnya mutu hasil belajar

siswa. Mutu sekolah/mutu hasil belajar siswa dilatarbelakangi oleh kemampuan, motivasi dan usaha belajar para siswa. Pengembangan kemampuan, motivasi, dan usaha belajar siswa didukung oleh kemampuan, motivasi dan cara kerja guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya. Sekolah yang bermutu baik dapat menerapkan kebijakan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat, sedang sekolah yang relatif mutunya masih rendah menerapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan yang lebih longgar.

Penerapan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat merupakan harapan berbagai pihak, baik para penentu kebijakan, pelaksana, peserta maupun pemakai hasil pendidikan. Kebijakan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat pada dasarnya merupakan penerapan sistem seleksi yang betul-betul berdasar pada perkembangan kemampuan siswa. Sistem demikian memungkinkan terjadinya proses kompetisi usaha belajar yang sehat, dan hal ini merupakan kunci bagi peningkatan mutu pendidikan.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang agak longgar model SMA "Y" (kelonggaran hanya terbatas pada siswa yang nilai kurangnya hanya sedikit), masih ada unsur mempertahankan mutu, tetapi yang sangat longgar seperti pada SMA "Z" sama sekali tidak ada unsur mempertahankan apalagi meningkatkan mutu sekolah/hasil belajar siswa. Sekolah model

demikian hanya memberikan formalitas pendidikan, sedang materi diabaikan sama sekali.

Sekolah yang menerapkan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang longgar, apalagi longgar tak terbatas sangat merugikan masyarakat maupun pendidikan itu sendiri. Lulusan dari sekolah demikian secara formal memiliki ijazah SMA, tetapi sesungguhnya secara material tidak bisa apa-apa. Mereka lebih banyak yang akan menjadi penganggur. Kalau pun bisa melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, hanya akan diterima pada Perguruan Tinggi yang kurang bermutu, kalau lulus akan menjadi lulusan yang tidak bermutu pula, tetapi kemungkinan besar mereka akan drop out. Kalau lulusan SMA demikian bekerja, mereka akan bekerja pada satuan kerja yang tuntutan pendidikannya sebenarnya di bawah SMA, tingkat SLTP bahkan mungkin hanya dituntut pengetahuan dan ketrampilan setara dengan SD. Pekerjaan yang menuntut pengetahuan dan ketrampilan setara SLTA kemungkinan besar tidak dapat mereka kerjakan.

Terhadap bidang pendidikan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang sangat longgar, sangat merugikan. Kegiatan belajar dan berbagai bentuk kegiatan penilaian hanya akan diterima siswa sebagai formalitas. Hal demikian akan menghilangkan makna dari proses pendidikan sendiri. Fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi hilang, pendidikan hanya akan diterima siswa sebagai suatu

proses yang harus dilalui. Pendidikan hanya berarti menjalani proses waktu belajar.

Mengapa kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang longgar bisa berjalan? Jawaban utamanya selain berkenaan dengan mutu sekolah (mutu pengelola, pelaksana, staf pendukung serta sarana dan prasarana belajar) serta kemampuan, motivasi dan usaha belajar dari para siswanya, yang tak kalah pentingnya adalah menyangkut pengelolaan pendidikan. Ada semacam anjuran dari pihak atasan, untuk memperkecil jumlah siswa yang tidak naik. Pihak atas mungkin bertujuan agar sekolah meningkatkan mutu sekolah, tetapi oleh sekolah yang kurang bermutu diartikan sebagai menurunkan/melonggarkan ketentuan dan prosedur kenaikan kelas. Penekanan persentase ketidaknaikan berkaitan erat dengan penyediaan tempat belajar bagi siswa baru, pengurangan biaya sekolah yang harus disediakan oleh orang tua, serta mengurangi frustrasi siswa.

Penggunaan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang ketat akan meningkatkan mutu pendidikan. Bagi sekolah yang kondisi sekolah, guru dan siswanya mendukung pelaksanaan pola demikian adalah harapan semua pihak, tetapi bagi sekolah yang kondisi sekolah, guru dan siswanya kurang atau tidak mendukung akan menimbulkan hambatan pada masalah pemerataan pendidikan. Banyak siswa yang tidak naik akan mengurangi kesempatan belajar bagi siswa baru. Apabila

diambil kebijaksanaan kenaikan kelas yang sangat longgar, masalah pemerataan dapat di atasi tetapi mutu pendidikan akan terus menurun. Alternatif yang paling mungkin diambil kiranya pola kebijaksanaan seperti pada SMA "Y" yaitu yang agak longgar.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas, merupakan kebijaksanaan dalam pengelolaan perkembangan belajar siswa. Keberhasilan dari pelaksanaan kebijaksanaan ini sangat bergantung pada proses belajar mengajar. Penggunaan kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang sangat longgar dapat dihilangkan, minimal dikurangi apabila pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik sudah dapat tercipta. Dalam penciptaan proses belajar mengajar yang baik maka guru memegang peranan kunci. Kemampuan dan pengalaman guru adalah hal yang penting, tetapi motivasi dan usaha guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang ideal adalah sangat penting.

C. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini. Rekomendasi ini terutama ditujukan pada para pemegang kebijaksanaan dalam implementasi kurikulum, pada kepala sekolah dan guru-guru di SMA.

1. Bagi para pemegang kebijaksanaan implementasi kurikulum

a. Menyusun Pedoman Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Kenaikan Kelas

Jumlah sekolah yang kondisi sekolah, guru dan siswanya belum baik, jumlahnya masih cukup banyak. Para pemegang kebijaksanaan dalam implementasi kurikulum terutama Kepala Kanwil dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, hendaknya menyusun pedoman pelaksanaan kenaikan kelas, sebagai penjabaran dan atau rincian dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum. Dalam pedoman tersebut dirinci dan dijelaskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum, serta beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan oleh sekolah atau guru. Ketentuan tentang penilaian segi-segi non akademis dapat masuk di dalamnya. Penilaian segi-segi akademis tentang kegiatan kokurikuler dan segi-segi non akademis perlu mendapatkan perumusan yang lebih jelas. Perumusan tersebut menyangkut dalam kondisi mana segi-segi tersebut

termasuk penilaian dan dalam kondisi mana tidak, rincian unsur-unsur yang dinilai dari masing-masing segi tersebut, serta kriteria penilaiannya.

b. Menambah Mata Uji dalam EBTANAS

Sistem ujian nasional (EBTANAS) tampaknya cukup efektif terhadap usaha membelajarkan siswa, meningkatkan usaha sekolah dalam mempersiapkan siswanya, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Kanwil dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dalam hal ini sebaiknya telah memberi isyarat untuk menambah bahan mata uji dalam ujian yang bersifat nasional tersebut, yakni dari hanya beberapa mata pelajaran yang diajarkan di SMA menjadi seluruh mata pelajaran sehingga data dari penyelenggaraan ujian tersebut lebih akan menggambarkan tentang sejauhmana kurikulum itu telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian gambaran tentang efektifitas kurikulum, ketercapaian tujuan, dan tingkat keberhasilan kurikulum diperoleh secara utuh sesuai dengan yang ditempuh siswa.

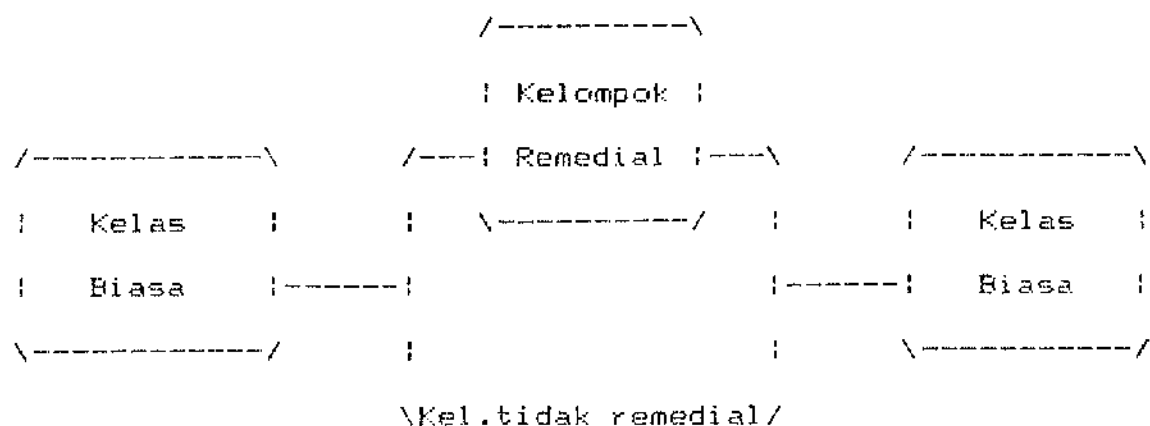
2. Bagi kepala sekolah

Penentuan pola kebijaksanaan dan pelaksanaan mana yang akan digunakan pada suatu sekolah, walaupun telah ada ketentuan dan pedoman dari atas akhirnya tergantung pada kepala sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam memilih kebijaksanaan dan

meningkatkan pelaksanaan kenaikan kelas.

- a. Pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas yang digunakan hendaknya tidak mengorbankan mutu pendidikan, kalau tidak bisa menggunakan pola yang ketat, maka yang dapat dipilih adalah pola yang agak longgar.
- b. Untuk meningkatkan pelaksanaan kenaikan kelas perlu disusun petunjuk teknis kenaikan kelas. Petunjuk ini merupakan penjabaran dari pedoman kenaikan kelas yang disusun oleh Kanwil atau Bidang Pendidikan Menengah Umum, merupakan pegangan bagi wali kelas dan guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kenaikan kelas. Petunjuk teknis berisi petunjuk tentang rincian unsur yang dapat dinilai, cara-cara menilai serta kriteria dalam menilai setiap unsur. Dalam petunjuk teknis juga dimuat rincian prosedur atau mekanisme pelaksanaan kenaikan kelas, mulai dari penilaian oleh guru, pengolahan nilai oleh wali kelas, sampai dengan rapat penentuan kenaikan kelas. Dalam penilaian oleh guru dijelaskan bagaimana menilai segi akademis (tes), yaitu pelaksanaan tes formatif dan sub sumatif, remedial, ulangan tes sub sumatif dan tes sumatif (kalau ada waktu ulangan tes sumatif bisa saja diadakan), menilai segi akademis berupa tugas-tugas, serta menilai segi-segi non akademis.

- c. Pengembangan program peningkatan proses belajar mengajar. Kepala sekolah dan guru-guru perlu mengembangkan suatu program bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar yang meliputi penggunaan strategi dan metode mengajar, penggunaan media pengajaran, pengadaan buku sumber/bahan bacaan siswa.
- d. Pengembangan program remedial. Kepala sekolah bersama guru-guru mengembangkan suatu program remedial atau program membantu para siswa yang belum menguasai bahan yang ditargetkan. Remedial diberikan kepada para siswa yang mendapatkan nilai kurang dalam tes formatif dan atau sub sumatif. Cara pemberian remedial dapat dalam bentuk: ulangan penjelasan, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas (membaca, menjawab soal dll.), belajar kelompok yang diawasi dll. Kegiatan remedial dilakukan di luar jam pelajaran, sore hari bagi yang sekolah pagi dan pagi hari bagi yang sekolah sore. Kedudukan program remedial dalam program belajar biasa dapat dilihat pada bagan berikut.



Bagan 6. Kedudukan program remedial

e. Program pengelompokan siswa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah bersama-sama dengan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah pengembangan program pengelompokan siswa. Pemilihan program ini hendaknya didasarkan atas pertimbangan yang matang, apakah kondisi sekolah mendukung atau tidak, sebab bisa menimbulkan eksek sosial psikologis yang kurang diharapkan. Pengelompokan dapat dilakukan terhadap siswa dalam satu kelas atau satu tingkat kelas, dengan demikian ada kelompok siswa cepat, sedang dan lambat dalam satu kelas atau ada kelas cepat, sedang dan lambat dalam satu tingkat kelas. Dengan pengelompokan demikian guru dapat lebih mudah dan terpusat memperhatikan siswa dalam satu kelompok atau satu kelas. Penjelasan lebih banyak dan lebih sederhana dapat diberikan pada kelompok/kelas yang lambat, juga tugas-

tugas khusus dapat diberikan pada mereka. Pengelompokan dapat didasarkan atas NEM masuk atau hasil-hasil ulangan.

3. Bagi guru

Guru adalah pelaksana terakhir dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan, apakah yang datang dari Departemen, Kanwil ataupun kepala sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelaksanaan kenaikan kelas beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah.

- a. Melaksanakan dengan seksama pedoman, petunjuk teknis tentang kenaikan kelas yang dikeluarkan Departemen atau Kanwil dan sekolah.
- b. Bekerja sama dengan guru-guru lain untuk melaksanakan program-program sekolah khususnya, program kenaikan kelas, program remedial dan pengelompokan siswa.
- c. Pemberian remedial hendaknya didasarkan atas kelemahan siswa dalam tes formatif atau subsumatif.
- d. Dalam mengajar hendaknya guru menggunakan strategi dan metode mengajar yang bervariasi dengan mengutamakan CBSA
- e. Dalam mengajar guru menggunakan media pengajaran.
- f. Guru berusaha mengembangkan alat evaluasi yang baik, dengan bentuk yang bervariasi antara penggunaan tes obyektif dengan essay.
- g. Guru memberikan penilaian terhadap semua tugas yang dikerjakan siswa, juga terhadap aktivitas siswa dalam

belajar di kelas.

5. Bagi para peneliti

Penelitian ini baru mengungkap hubungan antara pola kebijaksanaan dan pelaksanaan kenaikan kelas dengan kondisi sekolah, guru dan siswa secara umum. Perlu penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang kemampuan guru dan pelaksanaan mengajar mereka. Kemampuan guru meliputi penguasaan materi pelajaran serta teknik-teknik mengajar. Penelitian lebih lanjut dan mendalam juga perlu dilakukan terhadap siswa, bagaimana kemampuan belajar, motivasi serta usaha belajar mereka, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat hal-hal di atas. Bagaimana pengaruh keluarga terhadap cita-cita, motivasi dan usaha belajar mereka?.